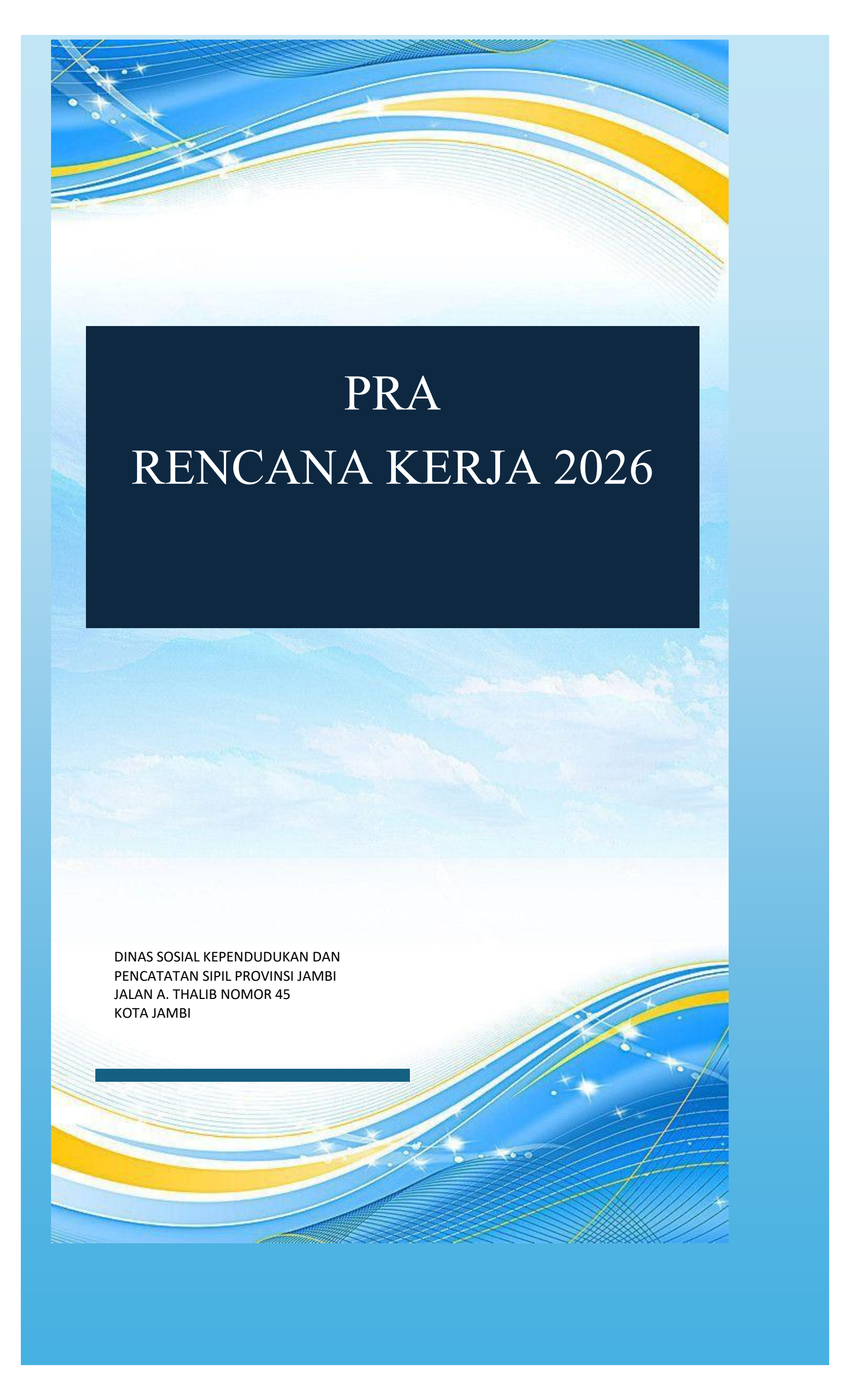




PRA RENCANA KERJA 2026

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI
JALAN A. THALIB NOMOR 45
KOTA JAMBI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan pada level satuan kerja organisasi perangkat daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberi gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai Tupoksinya.

Renja OPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan untuk menjaga kualitas sosial masyarakat yang berlangsung saat ini maka diperlukan rancangan awal dari rencana kerja Tahun 2026.

Untuk melaksanakan program pembangunan Tahun 2026 maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2026 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Renja disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi.

Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Penyusunan Renja merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Adapun muatan dalam rancangan Rencana Kerja 2026, adalah:

1. Pendahuluan.
2. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024
3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah
4. Penutup

B. Dasar Hukum

Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2026 ini disusun dengan mempedomani:

1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Menteri Sosial RI N0. 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026;
22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 20016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud disusunnya rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah untuk menggambarkan lebih terperinci mengenai rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Renja SKPD Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai pedoman/acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
2. Sebagai pedoman kerja bagi aparatur Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Adanya acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penyusunan Rencana Kerja yang memuat uraian singkat, latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, struktur organisasi, sumber daya manusia serta sistematika penulisan rancangan awal Rencana Kerja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat indikator kinerja, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

TRIWULAN I TAHUN 2025

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2025 pada Triwulan II menyesuaikan ketentuan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). Gambaran umum program dan kegiatan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. 1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 1. 4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1 Pengadaan Mebel
 - 1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
 - 1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- 2.1. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

2.2. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

2.2.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi

2.2.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi

2.2.3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi

2.2.4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan

III. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

3.1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah

IV. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

4.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant

4.1.1 Penyediaan Permakanan

4.1.2 Penyediaan Sandang

4.1.3 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

4.1.4 Penyediaan Alat Bantu

4.1.5 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant

4.1.6 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

4.1.7 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

4.1.8 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

4.1.9 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

4.1.10 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar

4.2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant

4.2.1 Pengasuhan

4.2.2 Penyediaan Makanan

4.2.3 Penyediaan Sandang

4.2.4 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

4.2.5 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant

4.2.6 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

4.2.7 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari

4.2.8 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

4.2.9 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

4.3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

- 4.3.1 Penyediaan Permakanan
- 4.3.2 Penyediaan Sandang
- 4.3.3 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses
- 4.3.4 Alat Bantu
- 4.3.5 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
- 4.3.6 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
- 4.3.7 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
- 4.3.8 Fasilitasi Pembuatan NIK bagi Penyandang Disabilitas
- 4.3.9 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- 4.3.10 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- 4.3.11 Pemulasaraan
- 4.3.12 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti

4.4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti

- 4.4.1 Penyediaan Permakanan
- 4.4.2 Penyediaan Sandang
- 4.4.3 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
- 4.4.4 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
- 4.4.5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
- 4.4.6 Pemulangan ke Daerah Asal
- 4.4.7 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti

4.5. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti

- 4.5.1 Penyediaan Permakanan
- 4.5.2 Penyediaan Sandang
- 4.5.3 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
- 4.5.4 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
- 4.5.5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
- 4.5.6 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
- 4.5.7 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
- 4.5.8 Pemulangan ke Daerah Asal
- 4.5.9 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA

V. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

5.1. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

- 5.1.1 Pengangkatan Anak antar WNI

5.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

- 5.2.1 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- 5.2.2 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 5.2.3 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

VI. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- 6.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
 - 6.1.1 Penyediaan Permakanan
 - 6.1.2 Penyediaan Sandang
 - 6.1.3 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - 6.1.4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - 6.1.5 Pelayanan Dukungan Psikososial

VII. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

- 7.1. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
 - 7.1.1 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
 - 7.1.2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
 - 7.1.3 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

VIII. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

- 8.1. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
 - 8.1.1 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional
 - 8.1.2 Pendataan Penduduk NonPermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
- 8.2. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - 8.2.1 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
- 8.3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - 8.3.1 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk

IX. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

- 9.1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
 - 9.1.1 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
- 9.2. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - 9.2.1 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

X. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- 10.1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - 10.1.1 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 10.1.2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
- 10. 2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - 10.2.1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 10.2.2 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

XI. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

11.1. Penyediaan Profil Kependudukan

11.1.1 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta
Kebutuhan yang lain

Realisasi capaian Program dan Kegiatan pada **Triwulan II** tahun Anggaran 2024 dengan nilai Pagu Rp. **33.010.013.126** adalah Rp. **30.512.240.928** atau **92.43** %. Rincian Capaian Realisasi sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL 1.
DAFTAR REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANA KEGIATAN (LPPK)
KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2024
(POSISI: BULAN DESEMBER 2024)

No	Program / Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
1	2	8	13	14	15	16
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		330625100	35260000	10,66	10,6646471	295.365.100
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	330625100	35260000	10,66	10,6646471	295.365.100
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		16802928119	7639672704	45,47	45,4663178	9.163.255.415
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.575.207.119	7565982704	45,65	45,6463841	9.009.224.415
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	227721000	73690000	32,36	32,3597736	154.031.000
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		18999900	0	0,00	0	18.999.900

1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.999.900,00	0	0,00	0	18.999.900
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah			103296684	28,1	28,1493524	263.662.678
			366.959.362,00			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8563690	0	0,0	0	8.563.690
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38917550	21186000	54,4	54,4381648	17.731.550
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28040640	0	0,0	0	28.040.640
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291437482	82110684	28,2	28,1743733	209.326.798
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	0	0,0	0
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0,0	0	0
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1432094590	529705019	37,0	36,9881307
						902.389.571
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	712358400	252355019	35,4	35,4252886	460.003.381
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	719736190	277350000	38,5	38,5349526	442.386.190
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			530810000	114070000	21,5	21,4897986
						416.740.000

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	478380000	114070000	23,8	23,8450604	364.310.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11950000	0	0,0	0	11.950.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40480000	0	0,0	0	40.480.000
II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
1. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		13583200	0	0,0	0	13.583.200
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	13583200	0	0,0	0	13.583.200
2. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		770225900	78330000	10,2	10,1697437	691.895.900
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	221050000	0	0,0	0	221.050.000
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	304174000	68700000	22,6	22,5857568	235.474.000

3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	245001900	9630000	3,9	3,93058176	235.371.900
III. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						
1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota		246987200	72269975	29,3	29,2606155	174.717.225
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah	246.987.200,00	72269975	29,3	29,2606155	174.717.225
IV. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		3110326833	878701980	28,3	28,251114	2.231.624.853
1	Penyediaan Permakanan	1657710000	447978030	27,0	27,0239083	1.209.731.970
2	Penyediaan Sandang	88284379	86454012	97,9	97,9267374	1.830.367
3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1017996780	308349938	30,3	30,2898736	709.646.842
4	Penyediaan Alat Bantu	2780000	0	0,0	0	2.780.000

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	18548300	0	0,0	0	18.548.300
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	78400000	5000000	6,4	6,37755102	73.400.000
7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	13726040	0	0,0	0	13.726.040
8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	960000	0	0,0	0	960.000
9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2397334	750000	31,3	31,2847521	1.647.334
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	41796000	12120000	29,0	28,9979902	29.676.000
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7921000	0	0,0	0	7.921.000
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	179807000	18050000	10,0	10,0385413	161.757.000
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		1018811965	297864000	29,2	29,2364058	720.947.965
1	Pengasuhan	2243000	0	0,0	0	2.243.000
2	Penyediaan Makanan	324167104	71541000	22,1	22,0691733	252.626.104

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

3	Penyediaan Sandang	46655776	38493000	82,5	82,5042541	8.162.776
4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	389066166	128800000	33,1	33,1049089	260.266.166
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	5282477	0	0,0	0	5.282.477
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	42194322	0	0,0	0	42.194.322
7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	51711120	37152000	71,8	71,845282	14.559.120
8	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	2250000	0	0,0	0	2.250.000
9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	129400000	21878000	16,9	16,9072643	107.522.000
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	13090000	0	0,0	0	13.090.000
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12752000	0	0,0	0	12.752.000
12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	0	0	0,0	0	0

13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	0	0	0,0	0	0
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		1358411044	411425470	30,3	30,2872589	946.985.574
1	Penyediaan Permakanan	801000000	187338000	23,4	23,388015	613.662.000
2	Penyediaan Sandang	24480000	24480000	100,0	100	0
3	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	166018484	62496184	37,6	37,644112	103.522.300
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	200614951	66000000	32,9	32,8988441	134.614.951
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	71100000	28700000	40,4	40,3656821	42.400.000
6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	57285322	31832786	55,6	55,5688349	25.452.536
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	1350000	0	0,0	0	1.350.000
8	Pemulasaraan	25000000	10578500	42,3	42,314	14.421.500

9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	11562287	0	0,0	0	11.562.287
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		230946965	53194000	23,0	23,0329937	177.752.965
1	Penyediaan Permakanan	106695000	30354000	28,4	28,4493181	76.341.000
2	Penyediaan Sandang	14108762	0	0,0	0	14.108.762
3	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	76724664	22840000	29,8	29,7687847	53.884.664
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	5939281	0	0,0	0	5.939.281
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	9775415	0	0,0	0	9.775.415
6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	6900000	0	0,0	0	6.900.000
7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	2444843	0	0,0	0	2.444.843
8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	28000	0	0,0	0	28.000

9	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	84000	0	0,0	0	84.000
10	Pemulangan ke Daerah Asal	8247000	0	0,0	0	8.247.000
11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	0	0	0,0	0	0
5. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti		363102305	52993180	14,6	14,594559	310.109.125
1	Penyediaan Permakanan	106695000	6000000	5,6	5,62350626	100.695.000
2	Penyediaan Sandang	11580600	0	0,0	0	11.580.600
3	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	78946104	21630000	27,4	27,3984388	57.316.104
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	3755242	0	0,0	0	3.755.242
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	3600000	0	0,0	0	3.600.000
6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	9899800	0	0,0	0	9.899.800

7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	3482059	0	0,0	0	3.482.059
8	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	0	0	0,0	0	0
9	Pemulangan ke Daerah Asal	11250000	0	0,0	0	11.250.000
10	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	133893500	25363180	18,9	18,9428016	108.530.320

V. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		44067570	2020000	4,6	4,58386973	42.047.570
1	Pengangkatan Anak antar WNI	44067570	2020000	4,6	4,58386973	42.047.570
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		1.745.188.800,00	402015651	23,0	23,0356539	1.343.173.149
1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1452391500	353960000	24,4	24,3708394	1.098.431.500
2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	116924000	27648651	23,6	23,6466859	89.275.349
3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	175873300	20407000	11,6	11,6032394	155.466.300

VI. PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		480194836	46773335	9,7	9,74049105	433.421.501
1	Penyediaan Permakanan	382763800	44553335	11,6	11,639903	338.210.465
2	Penyediaan Sandang	53098400	0	0,0	0	53.098.400
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	13000000	0	0,0	0	13.000.000
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	16489636	0	0,0	0	16.489.636
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	14843000	2220000	15,0	14,9565452	12.623.000
VII. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						
1. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		143.992.575,00	29.050.000,00	20,2	20,1746514	114.942.575
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	21811000	0	0,0	0	21.811.000
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	50181575	5050000	10,1	10,0634546	45.131.575
3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	72000000	24000000	33,3	33,3333333	48.000.000

VIII. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
		63852040	12798200	20,0	20,0435256	51.053.840
1. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan						
1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	63852040	12798200	20,0	20,0435256	51.053.840
IX. PROGRAM PENCATATAN SIPIL						
		58626000	11880990	20,3	20,2657353	46.745.010
1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi						
1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	58626000	11880990	20,3	20,2657353	46.745.010
X. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						
1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		36.392.000,00	9650000	26,5	26,5168169	26.742.000
1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36.392.000,00	9650000	26,5	26,5168169	26.742.000
2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		87.673.900,00	33644753	38,4	38,374879	54.029.147
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	87.673.900,00	33644753	38,4	38,374879	54.029.147

XI. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						
1. Penyediaan Profil Kependudukan		5796000	0	0	0	5.796.000
1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	5796000	0	0	0	5.796.000
TOTAL		29260596204	10.814.615.941	36,96	36,96	18.445.980.263

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sebagai lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi jambi, dalam melaksanakan kegiatan dalam kedudukannya yang mengacu pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Pelayanan Organisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan kebutuhan pelayanan.
- b. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang efektif sesuai dengan proporsi kerja yang dibebankan kepada SKPD.
- c. Meningkatkan disiplin aparatur melalui pemenuhan kebutuhan aparatur yang efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan kapasitas dan SDM aparatur melalui pembinaan dan peningkatan pengetahuan aparatur.
- e. Meningkatkan Sistem Pengembangan Sistem Pelaporan Organisasi, melalui penajaman visi dan misi organisasi dan Pemerintah Provinsi Jambi ke dalam Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan pelayanan sektor publik.
- f. Meningkatkan ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan PSKS dalam rangka penentuan arah dan kebijakan penyelenggaraan pembangunan Kessos.

Adapun lingkup pelayanan wajib Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, terdiri atas :

1. Sekretariat
2. Bidang Pemberdayaan Sosial;
3. Bidang Rehabilitasi Sosial;
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Bantuan Sosial;
5. Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin; dan

6. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. UPTD PSTW Budi Luhur
8. UPTD PSBAWEP Harapan Jaya

Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi melalui bidang urusan tersebut diatas dapat dilihat capaian kinerja Triwulan II sebagai berikut :

**LAPORAN REALISASI CAPAIAN KINERJA,KEUANGAN DAN KEBIJAKAN
PERIODE SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2025 (TRIWULAN I)**

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		JUMLAH PAGU	TARGET KINERJA PERTAHUN		TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA	
			ANGGARAN (RP)	JUMLAH	SATUAN	TRIWULAN I (SATUAN)	MARET	%
1	2		3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		19.462.283.071					
	1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	330.625.100	36	laporan	12 Laporan	12 Laporan	100
	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	330.625.100	36	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100
	2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	16.802.928.119	32	laporan	7 Laporan	7 laporan	100
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.575.207.119	14	Laporan	3 laporan	3 Laporan	100
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	227.721.000	18	laporan	4 Laporan	4 laporan	100
	3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	18.999.900					
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.999.900	12	laporan	3 laporan	0	0
	4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	366,959,362					
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.563.690	4	Paket	1 Paket	1 Paket	100

2	5	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38,917,550	2	Paket			
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.040.640	12	Paket	3 Paket	1 Paket	33.33
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.437.482	12	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.432.094.590					
	6	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	712.358.400	12	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	719.736.190	12	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		530.810.000					
	6	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	478.380.000	60	Unit	10	Unit	100
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.950.000	20	Unit	1	Unit	100
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.480.000	75	Unit	10	Unit	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		783.809.100					
	1	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		13.583.200					
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	13.583.200	12	pengawasan/patroli kab/kota	0	0	0
	2	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		770.225.900					

	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	221.050.000					
	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	304.174.000	144	PM	24 PM	10 - PM	0.9
	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	245.001.900	5	LEMBAGA	1	-	0
	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	246.987.200					
	1	<i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal</i>	246.987.200					
	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	246.987.200	600	PM	150 PM	255 PM	42.5
	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.081.502.412					
	1	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</i>	3.110.326.833					
	1	Penyediaan Permakanan	1.657.710.000	127	PM	127	127	100
	2	Penyediaan Sandang	88.284.379	127	PM	127	127	100
	3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.017.996.780	127	PM	127	127	100
	4	Penyediaan Alat Bantu	2.780.000					
	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	18.548.300	127	PM	127	127	100

	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	78.400.000	127	PM	127	127	100
	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	13.726.040	127	PM	127	127	100
	8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	960.000					
	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.397.334					
	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	41.796.000	127	PM	127		
	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7.921.000	127	PM	127		
	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	179.807.000	127	PM	127		
	2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.018.811.965					
	1	Pengasuhan	2.243.000	30	PM	30	25	#####
	2	Penyediaan Makanan	324.167.104	30	PM	30	25	#####
	3	Penyediaan Sandang	46.655.776	30	PM	30	25	#####
	4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	389.066.166	30	PM	30	25	#####
	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	5.282.477	30	PM	30	25	#####
	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	42.194.322	30	PM	30	25	#####
	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	51.711.120	30	PM	30	25	#####

	3	8	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	2.250.000					
		9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	129.400.000	30	PM	30	25	#####
		10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	13.090.000	30	PM	30		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		1.358.411.044					
		1	Penyediaan Permakanan	801.000.000	72	PM	72		
		2	Penyediaan Sandang	24.480.000	72	PM	72	-	-
		3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	166.018.484	72	PM			
		4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	200.614.951	72	PM	-	-	-
		5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	71.100.000	72	PM			
		6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	57.285.322	72	PM	-	-	
	4	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	1.350.000	8	PM	5	3	60
		8	Pemulasaraan	25.000.000	21	PM	6	2	#####
		9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	11.562.287					
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		230.850.265					
		1	Penyediaan Permakanan	106.695.000	15	PM	15	5	

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

	2	Penyediaan Sandang	14.108.762	15	PM	15	5	
	3	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	76.627.964	15	PM	15	5	
	4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	5.939.281	15	PM	15	5	
	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	9.775.415	15	PM	15	5	
	6	Pemberian Blmbingan Aktivitas Hidup Sehari - Hari	6.900.000					
	7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	2.444.843					
	8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran	28.000					
	9	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	84.000					
	10	Pemulangan ke Daerah Asal	8.247.000	15	PM	15	5	
	7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	0	15	PM	15	5	
	5	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti	363.102.305					
	1	Penyediaan Permakanan	106.695.000	15	PM	15	8	
	2	Penyediaan Sandang	11.580.600	15	PM	15	8	
	3	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	78.946.104	15	PM	15	8	
	4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	3.755.242	15	PM	15	8	

	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	3.600.000	15	PM	15	8	
	6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	9.899.800	15	PM	15	8	
	7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	3.482.059	15	PM	15	8	
	8	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	0					
	9	Pemulangan ke Daerah Asal	11.250.000	15	PM	15	8	
	10	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	133.893.500	15	PM	15	8	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
	1	<i>Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal</i>	44.067.570					
	1	Pengangkatan Anak antar WNI	44.067.570	4	Laporan	4 Laporan	4	#####
	2	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</i>	1.745.188.800					
	1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.452.391.500	459	Keluarga	20 keluarga	20 keluarga	100.00%
	2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	116.924.000	12	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100.00%
	3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	175.873.300	40	Kelompok	20 kelompok	18 kelompok	90.00%
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
	1	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</i>	480.194.836					

	1	Penyediaan Permakanan	382.763.800	2000	Orang	-	-	0
	2	Penyediaan Sandang	53.098.400	0	Laporan	-	-	0
	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	13.000.000	751	Orang	62 Orang	77 Orang	9,753,246
	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	16.489.636	100	Orang	0	0	0
	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	14.843.000	200	Orang	0	0	0
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							
	1	<i>Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</i>	143.992.575					
	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	21.811.000	1	kegiatan	0	0	0
	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	50.181.575	1500	M2	0	0	0
	3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	72.000.000	12	Bulan	3	3	100
8	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							
	1	<i>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</i>	63.852.040					
	1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	63.852.040					
9	PROGRAM PENCATATAN SIPIL							
	1	<i>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</i>	58.626.000					
	1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	58.626.000	3	Kegiatan	1	1	100
10	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							
	1	<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</i>	36.392.000					
	1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36.392.000	11	laporan	3	3	100

	2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	87.673.900					
	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	87.673.900	11	laporan	3	3	100
11		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						
	1	Penyediaan Profil Kependudukan	5.796.000					
	1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	5.796.000	2	dokumen	0	0	0

1. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam tahun 2026 adalah sebagai berikut **Pertama**, Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial, Advokasi dan Rehabilitasi, serta persentase PSKS yang aktif. **Kedua** Persentase perekaman dan pencetakan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

a. Isu Strategis Bidang Sosial

Adapun yang menjadi *Isu Strategis* dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi adalah :

- Pemenuhan SPM Bidang Sosial yang belum maksimal
- Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS PSKS yang belum optimal.
- Proses Verval DTKS Provinsi Jambi yang masih terkendala pada Kabupaten/Kota yang tidak mengganggu Verifikasi dan Validasi DTKS.
- Pemberdayaan PMKS dan PSKS belum berorientasi kepada peningkatan produktivitas dan Keberfungsian Sosial.
- Sarana dan Prasarana Panti dalam penerapan SPM belum memadai.

b. Isu Strategis Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Adapun yang menjadi *Isu Strategis* dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Jambi adalah :

- Belum optimalnya pengelolaan dan pendataan penduduk di Kabupaten/Kota, hal ini ditandai dengan adanya penduduk yang belum terdaftar sehingga tidak memiliki identitas, distribusi penduduk pindah dan datang, dan pencatatan ke dalam dokumen kependudukan.
- Masih terdapat jumlah penduduk yang tidak tercatat dalam pencatatan sipil kependudukan, antara lain pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, status anak, kewarganegaraan, dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2026 disusun menyesuaikan dengan Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Jambi 2021 – 2026, maka Tujuan Dan Sasaran Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM.
2	memantapkan Tata kelola Pemerintah.	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima.	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil.
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan.
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan.
			Persentase Pengeluaran Profil Kependudukan.

A. Program dan Kegiatan Tahun 2026

Pada Tahun 2026 Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi masih melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan barang cetak dan penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
 - Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
 - Lainnya

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
2. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial masyarakat Kewenangan Provinsi
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga

Kewenangan Provinsi

- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi

III. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

-

IV. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
 - Penyediaan Permakanan (Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
 - Pengasuhan
 - Penyediaan Makanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - Pemulasaraan

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Pant
- 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 - Pemulangan ke Daerah Asal"
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Pant
- 5. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 - Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
 - Pemulangan ke Daerah Asal
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA

V. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
 - Pengangkatan Anak antar WNI
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

VI. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - Pelayanan Dukungan Psikososial

VII. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

1. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

- Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

VIII. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

1. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
 - Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional
 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
3. Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk
 - Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk

IX. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
 - Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
 - Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

X. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - Pembinaan dan pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

XI. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

1. Penyediaan Profil Kependudukan
 - Penyediaan data kependudukan provinsi
 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain

B. Program dan Kegiatan Tahun 2026

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

RENJA 2026		
Uraian	Renja 2026	Rankuapps
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI	Rp 34.298.703.888	Rp 29.260.596.204
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 33.745.057.188	Rp 29.008.256.264
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Rp 33.745.057.188	Rp 29.008.256.264
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 21.381.229.059	Rp 19.482.417.071
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 671.868.000	Rp 330.625.100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 671.868.000	Rp 330.625.100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 16.851.639.096	Rp 16.802.928.119
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 16.575.207.096	Rp 16.575.207.119
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 276.432.000	Rp 227.721.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 57.599.900	Rp 18.999.900
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 57.599.900	Rp 18.999.900
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 907.221.233	Rp 366.959.362
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 35.000.000	Rp 8.563.690
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 229.325.998	Rp 38.917.550
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 50.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 52.249.050	Rp 28.040.640
Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 540.646.185	Rp 291.437.482
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 50.000.000	Rp -
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp -	Rp -
Pengadaan Mebel	Rp 50.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.544.600.830	Rp 1.432.094.590
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 750.000.000	Rp 712.358.400
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 794.600.830	Rp 719.736.190
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.298.300.000	Rp 530.810.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 1.048.300.000	Rp 478.380.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 50.000.000	Rp 11.950.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 200.000.000	Rp 40.480.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 765.217.360	Rp 783.809.100
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 35.444.000	Rp 13.583.200
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp 35.444.000	Rp 13.583.200
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Rp 729.773.360	Rp 770.225.900

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi		
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi		
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi		
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Rp 598.922.200	Rp 525.224.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Rp 49.999.999	Rp 74.150.739
Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota		
Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Rp 57.607.000	Rp 97.607.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Rp 23.244.161	Rp 73.244.161
Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Rp 12.771.361	Rp 12.771.361
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT	Rp -	Rp -
Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap karakteristik sosial KAT		
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp 294.001.450	Rp 246.987.200
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Rp 294.001.450	Rp 246.987.200

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Rp 294.001.450	Rp 246.987.200
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 7.752.323.802	Rp 6.081.599.112
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Rp 3.771.250.530	Rp 2.930.519.833
Penyediaan Permakanan	Rp 1.891.349.733	Rp 1.657.710.000
Penyediaan Sandang	Rp 273.588.266	Rp 88.284.379
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp 1.186.484.461	Rp 1.017.996.780
Penyediaan Alat Bantu	Rp -	Rp 2.780.000
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp 30.469.470	Rp 18.548.300
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp 188.000.000	Rp 78.400.000
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp 33.515.100	Rp 13.726.040
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Rp 1.050.000	Rp 960.000
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp 20.000.000	Rp 2.397.334
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp 46.047.500	Rp 41.796.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp 46.047.500	Rp 7.921.000
Pemulasaran	Rp 10.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Rp 44.698.500	
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Rp 1.354.985.752	Rp 1.018.811.965
Pengasuhan	Rp 16.478.000	Rp 2.243.000
Penyediaan Makanan	Rp 331.885.400	Rp 324.167.104
Penyediaan Sandang	Rp 64.988.692	Rp 46.655.776
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp 405.624.410	Rp 389.066.166
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp 5.203.044	Rp 5.282.477
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp 69.759.746	Rp 42.194.322
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp 111.428.460	Rp 51.711.120

Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Rp 1.872.000	Rp 2.250.000
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp 180.420.000	Rp 129.400.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp 60.270.000	Rp 13.090.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp 32.232.000	Rp 12.752.000
Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Rp 4.010.000	
Pemulasaran	Rp 10.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Rp 60.814.000	
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Rp 1.552.252.748	Rp 1.358.411.044
Penyediaan Permakanan	Rp 895.179.600	Rp 801.000.000
Penyediaan Sandang	Rp 105.000.000	Rp 24.480.000
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp 185.240.000	Rp 166.018.484
Penyediaan Alat Bantu		
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Rp 185.078.400	Rp 200.614.951
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp 72.600.000	Rp 71.100.000
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp 8.905.748	Rp 57.285.322
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Rp 2.700.000	Rp 1.350.000
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp 30.049.000	
Pemulasaraan	Rp 36.000.000	Rp 25.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Rp 31.500.000	Rp 11.562.287
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Rp 315.834.915	Rp 230.946.965
Penyediaan Permakanan	Rp 106.695.000	Rp 106.695.000
Penyediaan Sandang	Rp 25.889.982	Rp 14.108.762

Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Rp	85.278.672	Rp	76.724.664
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp	6.088.302	Rp	5.939.281
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp	14.947.990	Rp	9.775.415
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp	31.950.000	Rp	6.900.000
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Rp	8.174.969	Rp	2.444.843
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak		Rp 28.000	Rp	28.000
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Rp 84.000	Rp	84.000
Pemulangan ke Daerah Asal	Rp	15.154.000	Rp	8.247.000
Pemulasaran	Rp	10.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Rp	11.544.000		
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Rp	757.999.857	Rp	542.909.305
Penyediaan Permakanan	Rp	106.695.000	Rp	106.695.000
Penyediaan Sandang	Rp	24.520.060	Rp	11.580.600
Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Rp	85.950.736	Rp	78.946.104
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp	3.755.242	Rp	3.755.242
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp	22.500.000	Rp	3.600.000
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp	10.123.800	Rp	9.899.800
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Rp	10.189.019	Rp	3.482.059
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Rp 14.000		
Pemulangan ke Daerah Asal	Rp	24.252.000	Rp	11.250.000
Pemulasaran	Rp	10.000.000		

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Rp 10.000.000	
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Rp 350.000.000	Rp 133.893.500
Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Rp 100.000.000	Rp 179.807.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 2.455.998.360	Rp 1.789.256.370
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Rp 80.000.000	Rp 44.067.570
Pengangkatan Anak antar WNI	Rp 80.000.000	Rp 44.067.570
Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Rp 2.375.998.360	Rp 1.745.188.800
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 1.737.490.020	Rp 1.452.391.500
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 175.387.300	Rp 116.924.000
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp 463.121.040	Rp 175.873.300
Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 877.040.000	Rp 480.194.836
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Rp 877.040.000	Rp 480.194.836
Penyediaan Permakanan	Rp 449.296.600	Rp 382.763.800
Penyediaan Sandang	Rp 101.098.400	Rp 53.098.400
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp 90.000.000	Rp 13.000.000
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Rp 136.645.000	Rp 16.489.636
Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp 100.000.000	Rp 14.843.000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp 219.247.157	Rp 143.992.575

Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rp 219.247.157	Rp 143.992.575
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rp 37.741.980	Rp 21.811.000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rp 109.505.177	Rp 50.181.575
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rp 72.000.000	Rp 72.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 553.646.700	Rp 252.339.940
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 553.646.700	Rp 252.339.940
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 150.800.000	Rp 63.852.040
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Rp 150.800.000	Rp 63.852.040
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Rp 150.800.000	Rp 63.852.040
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Rp -	Rp -
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk		
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp 128.011.000	Rp 58.626.000
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Rp 128.011.000	Rp 58.626.000
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Rp 128.011.000	Rp 58.626.000
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp -	Rp -
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp 259.954.000	Rp 124.065.900
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 111.332.000	Rp 36.392.000
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 111.332.000	Rp 36.392.000

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp 148.622.000	Rp 87.673.900
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 148.622.000	Rp 87.673.900
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp 14.881.700	Rp 5.796.000
Penyediaan Profil Kependudukan	Rp 14.881.700	Rp 5.796.000
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Rp 14.881.700	Rp 5.796.000
TOTAL	Rp 34.298.703.888	Rp 29.260.596.204

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Provinsi Jambi.
2. Penyusunan Renja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi ini berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi 2021-2026, seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis.
3. Penyusunan Renja ini juga berpedoman pada RKPD Provinsi Jambi, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
4. Renja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Jambi Tahun 2026.
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh inspektorat Provinsi Jambi, begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Provinsi Jambi.

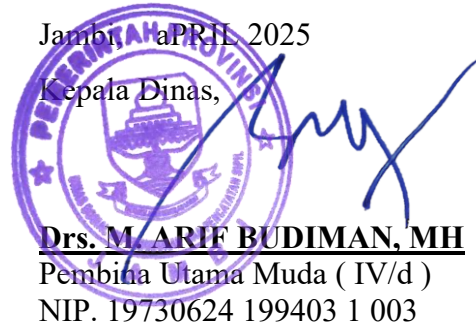
Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2026 ini merupakan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

Dalam melaksanakan Rencana Kerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta

Pemerintah Pusat. Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi ini akan tergambar dalam Laporan Kinerja Instansi (LKj).

Jambi, 14 APRIL 2025

Kepala Dinas,



Drs. M. ARIF BUDIMAN, MH

Pembina Utama Muda (IV/d)

NIP. 19730624 199403 1 003